

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses pembangunan memerlukan *Gross National Product (GNP)* yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Dalam tujuan ekonomi masalah tersebut dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan(Suharjo,1997).

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara berkembang, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, mengapa masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga di negara ini, rasanya tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1997-2006 ( juta dan persen ).**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1997	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,20	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97
2006	14,29	24,76	39,05	13,36	21,90	17,75

*Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas)*

*Tabel 1* menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak didominasi di daerah pedesaan, lebih 2 kali lipat dari perkotaan. jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1997-2006 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2001-2005. Pada periode 1997- 1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1997 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.

Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002- 2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Menurut hasil laporan tahunan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Berikut adalah data Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2008 – Februari 2012 :

**Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera  
Tahun 2008-2012 (ribuan jiwa).**

Provinsi	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	23.53	21.80	20.98	19.57	19.46
Sumatera Utara	12.55	11.51	11.31	11.33	10.67
Sumatera Barat	10.67	9.54	9.50	9.04	8.19
Riau	10.63	9.48	8.65	8.47	8.22
Jambi	9.32	8.77	8.34	8.65	8.42
Sumatera Selatan	17.73	16.28	15.47	14.24	13.78
Bengkulu	20.64	18.59	18.30	17.50	17.70
<b>Lampung</b>	<b>20.98</b>	<b>20.22</b>	<b>18.94</b>	<b>16.93</b>	<b>16.18</b>
Bangka Belitung	8.58	7.46	6.51	5.75	5.53
Kep. Riau	9.18	8.27	8.05	7.40	7.11

*Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik .2014*

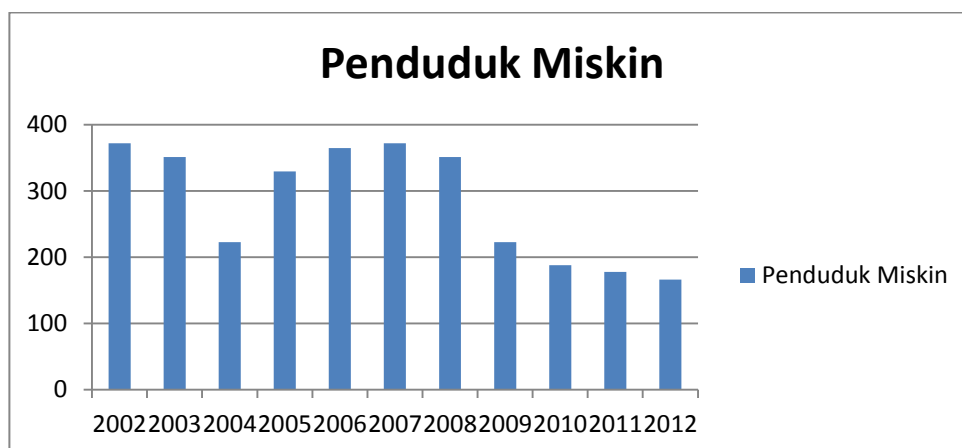
Tabel 2 memperlihatkan bahwa Provinsi Lampung pada Tahun 2012, mempunyai persentase kemiskinan di urutan ke-3 dibandingkan provinsi lainnya diwilayah Sumatera. Tetapi Kemiskinan Provinsi Lampung cenderung menurun dari tahun 2008 hingga 2012. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 428.54 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) tercatat sebanyak 1.163 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 menurun dan hingga akhir tahun 2013 mencapai 14,46%. Namun tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung

masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata tingkat kemiskinan nasional (11,37%).

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Salah satu ciri penduduk desa adalah sumber mata pencahariannya sebagai petani. Salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki jumlah penduduk miskin dalam jumlah yang tinggi adalah Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten yang mempunyai sektor sektor unggulan yang dapat di jadikan daya tarik akan pendapatan daerah tersebut. Contohnya saja sektor pariwisata dan sektor pertanian, komoditas unggulan seperti jagung, padi, singkong.

Berikut adalah Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2002-2012 :

**Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2002-2012 ( Ribuan Jiwa )**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*

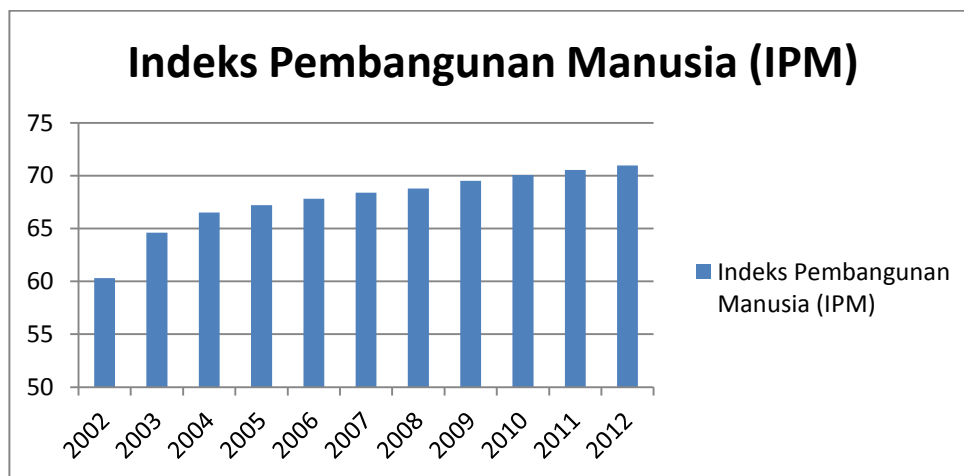
Pada Gambar 2 dapat diperhatikan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan mengalami keadaan yang tidak stabil. Khususnya pada tahun 2004 ( 222.500 jiwa) yang mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2003 ( 351.200 jiwa) . Kemudian jumlah penduduk miskin kembali melonjak turun pada tahun 2005 sehingga menjadi 329.200 ribuan jiwa dan terus mengalami penurunan kembali sampai tahun 2012 menjadi 165.800 ribuan jiwa. Sejalan dengan sasaran pembangunan , pemerintah berupaya memajukan pembangunan pertanian ke arah struktur produksi komoditas yang lebih beragam melalui berbagai program diversifikasi pangan untuk menekan tingkat kemiskinan penduduk yang mayoritas tinggal di wilayah pedesaan dan umumnya bekerja di sektor pertanian seperti masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

Kemiskinan terjadi karena adanya berbagai faktor, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Pada masyarakat di tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, secara rata-rata memiliki

tingkat pendidikan yang rendah sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang rendah pula.

Berikut adalah data Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2002-2012.

**Gambar 3. Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2002-2012 ( Persen )**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*

Seiring dengan banyaknya program pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi maka dapat dilihat di Gambar 3, persentase Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2002 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 60,2 persen kemudian terus mengalami peningkatan sampai tahun 2012 sehingga menjadi 70,95 persen. Setiap tahunnya mengalami peningkatan, dilandasi atas kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan yang layak, kesadaran akan kesehatan diri dan lingkungan, serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

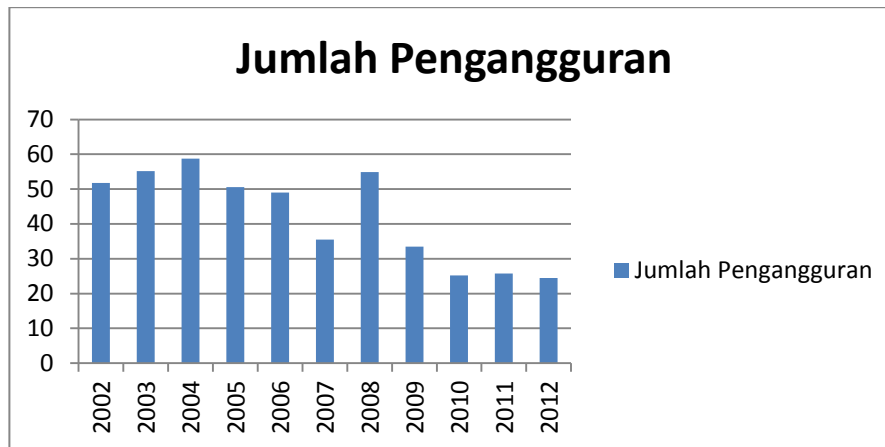


Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Menurut Sukirno (2000), Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Fenomena yang terjadi di masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lampung Selatan adalah pengangguran yang disebabkan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah serta tidak mempunyai keahlian khusus yang dapat diandalkan.

Sedangkan Kabupaten Lampung Selatan sendiri mempunyai sektor-sektor pariwisata, sector pertanian yang dapat diunggulkan dan tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Berikut adalah data Jumlah Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2002-2012.

**Gambar 4. Jumlah Pengangguran di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2002-2012 ( Ribuan Jiwa )**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*

Dapat dilihat pada Gambar 4, jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Lampung Selatan berfluktuasi, tetapi cenderung menurun. Pada tahun 2008 jumlah pengangguran mengalami kenaikan dari 35.499 jiwa pada tahun 2007 menjadi 54.859 jiwa.

Pemerintah terus melakukan program-program ekonomi dan non-ekonomi untuk menanggulangi pengangguran, kemiskinan dan menciptakan kemakmuran pada suatu daerah. Seiring berjalannya program tersebut semakin membuat masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan sadar akan pentingnya mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan, dilihat sampai tahun 2012 jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Selatan menjadi 24.512 jiwa.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang

berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001).

Pemerintah dituntut dapat mengupayakan peningkatan kinerja ekonomi dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Melalui pengenalan potensi baik ekonomi maupun non ekonomi yang ada di suatu daerah yang nantinya akan memberikan konsekuensi yang positif terhadap pembangunan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi akan dapat terus berkembang dan meningkat. Dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat berperan aktif dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, khususnya Kabupaten Lampung Selatan dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang yang berfokus pada ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung dengan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2002-2012”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2002-2012 ?

### **C. Tujuan Penelitian :**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2002-2012.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2002-2012.

### **D. Manfaat Penelitian :**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai pengaruh Pengangguran, serta indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemiskinan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota tentang variabel

yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan.

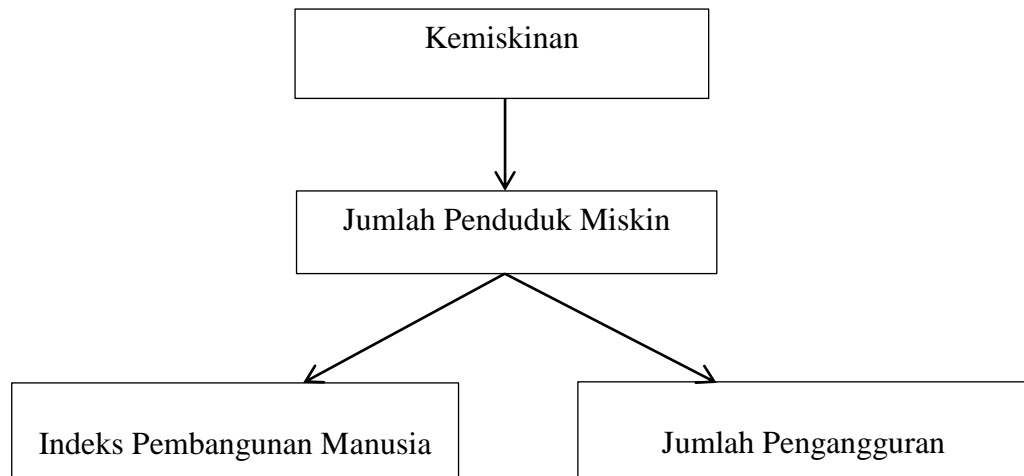
Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia

tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Lanjouw (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Penduduk miskin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis penduduk yang mengalami kemiskinan absolut. Dimana kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling rendah. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya mengacu kepada definisi kemiskinan tersebut.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan masih yang paling tinggi dibanding dengan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Lampung. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan masih berada dibawah garis kemiskinan, merupakan suatu kenyataan yang membuat kita prihatin karena seolah-olah kemiskinan itu tetap muncul dan merupakan bagian dari pembangunan, padahal pembangunan ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan bukan berjalan bersama-sama. Besarnya angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama pada indeks pembangunan manusia, dan pengangguran.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian**

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2002-2012.
2. Diduga variabel Jumlah Pengangguran berpengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2002-2012.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang penggambaran teori yang melandasi penelitian ini serta hasil penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari populasi sampel, data dan sumber data, data penelitian dan metode analisis data.

### **BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan secara rinci tentang analisis data serta pembahasan hasil yang diperoleh secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan, Keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**